

**INOVASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
(STUDI KASUS SALURAN KOMUNIKASI  
E-BUDGETING DI PROVINSI SULAWESI SELATAN)**

***Innovation Financial Management Of Regional  
(Case Study Of communication Channels  
E-Budgeting In South Sulawesi Province)***

**Asriani Basir<sup>1</sup>, Alwi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Hasanuddin Makassar.  
krebs\_blueshe@yahoo.com

<sup>2</sup>Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar

**ABSTRACT**

*This study aims to find out the innovation of e-budgeting application in the regional financial management in South Sulawesi Province and the innovation of the State Civil Apparatus (ASN) towards the innovation of e-budgeting application in the regional financial management in South Sulawesi Province to the innovative of Civil State Apparatus towards the application of e-budgeting as an innovation of local financial management. This research use descriptive qualitative approach. The research data was obtained through observation, documentation and in-depth interviews of 12 informants from the Regional Finance Management Agency of Takalar Regency, Bantaeng and Bulukumba, consisting of 6 officials and 6 Budget Plans Team in each District using purposive sampling technique. The results showed that application e-budgeting in local financial management in South Sulawesi Province is an innovation that is online. The innovation of the State Civil Apparatus (ASN) towards innovation e-budgeting in the regional financial management in South Sulawesi Province varies because the communication channels used are different so the time period used varies so the speed of adoption of an innovation is influenced by the profit relative, when an innovation is more profitable then the faster the adoption process of the innovation.*

**Keywords:** *Innovation, E-Budgeting, Regional Financial Management*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengetahui inovasi aplikasi *e-budgeting* dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dan keinovatifan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap inovasi aplikasi *e-budgeting* dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan keinovatifan Aparatur Sipil Negara terhadap penerapan aplikasi *e-budgeting* sebagai inovasi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam 12 informan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, Bantaeng dan Bulukumba, terdiri dari 6 orang pejabat dan 6 orang Tim Penyusun Anggaran di masing-masing Kabupaten dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi *e-budgeting* dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan sebuah inovasi yang bersifat online. Keinovatifan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap inovasi *e-budgeting* dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan berbeda-beda karena saluran komunikasi yang digunakan berbeda-beda sehingga jangka waktu yang digunakan pun berbeda-beda dengan demikian kecepatan adopsi terhadap suatu inovasi dipengaruhi oleh keuntungan relatif, ketika suatu inovasi lebih banyak memberikan keuntungan maka semakin cepat proses adopsi terhadap inovasi tersebut.

**Kata kunci :** Inovasi, E-budgeting, Pengelolaan Keuangan Daerah

## PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam kehidupan khususnya dalam lingkup pemerintahan berkembang dengan sangat pesat. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan kinerja yang harus ditingkatkan agar lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, auditabel dan ekonomis. Mengingat akan hal itu pada tahun 2003, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah membentuk Satuan Tugas Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

SIMDA berbasis elektronik dalam hal penganggaran yaitu *e-budgeting* dalam penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah. Dalam sistem *e-budgeting* ini tertuang mengenai plafon anggaran kegiatan operasional pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah SKPD. *E-budgeting* merupakan sebuah sistem penganggaran berbasis elektronik yang berfungsi mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, pemborosan anggaran dan tindak pidana korupsi. Penerapan sistem aplikasi ini mampu meningkatkan efektivitas, kualitas dan pengawasan kinerja aparat pemerintahan. Selain itu penerapan sistem aplikasi *e-budgeting* juga mampu membentuk transparansi pengelolaan keuangan sehingga mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel.

Aplikasi *e-budgeting* ini merupakan sebuah inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Inovasi pengelolaan keuangan ini menjadi aspek penting dalam lingkup Pemerintahan Daerah untuk membantu dalam pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi yang dimulai dari penganggaran, akuntansi, dan pengelolaan keuangan daerahnya. Inovasi adalah gagasan, tindakan atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Kebaruan inovasi itu diukur secara subyektif, menurut pandangan individu yang menangkapnya. Suatu ide dianggap baru ketika seseorang menganggap ide itu baru. Baru dalam ide yang inovatif tidak berarti harus baru sama sekali. Suatu inovasi mungkin telah lama diketahui oleh seseorang beberapa waktu yang lalu akan tetapi belum mengembangkan sikap

suka/tidak suka, menerima/menolak inovasi tersebut. (Rogers dalam Hanafi, 1987)

Inovasi ini akan melalui proses difusi absorpsi menjadi mekanisme rutin dalam sistem sosial. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *e-budgeting* sebagai inovasi pengelolaan keuangan daerah terdifusi ke dalam sistem sosial melalui saluran komunikasi dalam jangka waktu tertentu. Difusi merupakan proses dimana inovasi tersebar kepada anggota dalam suatu sistem sosial. Difusi inovasi sebagai suatu proses *transfer of knowledge* menjadi suatu hal yang esensi dalam mendorong percepatan tumbuhnya perekonomian dan kesejahteraan nasional. Sistem informasi manajemen daerah merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu aparatur daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah secara tertib dan akuntabel sehingga tercipta pelaporan keuangan yang akuntabel dan konsisten.

Difusi adalah proses yang dengannya inovasi menyebar dari waktu ke waktu kepada anggota sistem sosial. Suatu inovasi adalah pengenalan sesuatu yang baru, sebuah proyek, praktik atau ide. Proses keputusan inovasi adalah proses kemajuan yang dijalani individu dari pertemuan pertama dengan inovasi ke adopsinya. Keinovasian adalah ukuran adopsi awal; individu dianggap inovatif dan menjadi agen perubahan potensial jika mereka mau mengadopsi ide-ide baru ketimbang anggota lain dari sistem dan mau melakukannya lebih awal ketimbang anggota lain. Terakhir, tingkat adopsi inovasi adalah kecepatan relatif pengadopsian inovasi. (Littlejohn, W Stephen & Karen A. Foss, 2014)

Berdasarkan informasi awal yang penulis temukan bahwa pada saat ini terdapat 13 Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang menggunakan aplikasi *e-budgeting* sebagai inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah, namun penulis hanya meneliti di tiga Kabupaten yakni Kabupaten Takalar, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bulukumba. Inovasi-inovasi yang dilakukan ternyata menimbulkan beberapa permasalahan.

Salah satu permasalahannya adalah penetapan indikator kinerja yang selama ini masih terfokus pada pencapaian *output*, seharusnya pemerintah daerah melalui SKPD lebih banyak menampilkan pencapaian kinerja *outcome*, sebab indikator kinerja inilah yang dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan suatu program/kegiatan dalam mencapai sasaran strategis. Permasalahan lain yang tercipta adalah keinovatifan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses difusi aplikasi *e-budgeting* sebagai inovasi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan berbeda-beda.

Tujuan yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1). untuk mengetahui inovasi aplikasi *e-budgeting* dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan (2). untuk mengetahui keinovatifan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap inovasi aplikasi *e-budgeting* dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

## BAHAN DAN METODE

### *Lokasi dan rancangan penelitian*

Penelitian ini di laksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan yakni Kabupaten Takalar, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Rosady (2010), mengatakan *qualitative research* (riset kualitatif) merupakan jenis penelitian yang mendeskripsikan peristiwa di lapangan melalui wawancara untuk mendapatkan data, yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekatan ini berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan angka.

### *Informan*

Informan dalam penelitian ini adalah 12 (dua belas) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari 6 (enam) orang pejabat dan 6 (enam) orang Tim Penyusun Anggaran, masing-masing kabupaten terdiri dari 2 (dua) orang pejabat dan 2 (dua) orang tim penyusun anggaran.

### *Metode pengumpulan data*

Pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara mendalam (*Indepth Interview*), observasi dan dokumentasi terhadap informan di lapangan, guna mendapatkan data sesuai tujuan penelitian.

### *Analisis data*

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Penganalisaan terhadap kondisi saat ini (*curent condition*) dalam hal ini penganalisaan terhadap aplikasi yang telah ada, infrastruktur jaringan, sumber daya manusia (SDM) pendukung, *Computer Literacy*, peraturan-peraturan (regulasi) internal yang ada dan terkait dengan aplikasi sistem *e-budgeting*. (2) Penganalisaan terhadap kondisi ideal (*future state*), penganalisaan ini dimaksudkan untuk menyusun kondisi atau konsep ideal bagi Pemerintah Daerah terkhusus Kabupaten Takalar, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bulukumba sebagai bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengembangan aplikasi sistem *e-budgeting* untuk mendukung terciptanya *good governance* menuju *e-government* dan (3) Penganalisaan terhadap kendala-kendala yang ada (*gap analysis*) yaitu kesenjangan yang ada antara kondisi ideal yang ingin dicapai, kondisi dimana aplikasi sistem *e-budgeting* akan dapat dipergunakan secara optimal dalam pengelolaan penyusunan dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah di provinsi Sulawesi Selatan.

## HASIL PENELITIAN

### *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

Sulawesi Selatan adalah salah satu Provinsi yang terletak di Pulau Sulawesi yaitu Sulawesi bagian Selatan. Provinsi yang sering disebut dengan singkatan SulSel ini didirikan pada tanggal 13 Desember 1960 berdasarkan Dasar Hukum UU N0. 47 Tahun 1960. Oleh karena itu, tanggal 13 Desember selalu diperingati sebagai Hari jadi Provinsi Sulawesi Selatan.

Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di Makassar terletak antara 0°12' – 8° Lintang Selatan dan 116°48'-122°36' Bujur Timur yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat di Sebelah Utara dan Teluk Bone serta Provinsi Sulawesi Tenggara di Sebelah Timur. Batas

sebelah Barat dan Timur masing-masing adalah Selat Makassar dan Laut Flores. Jumlah sungai yang mengalir Wilayah Sulawesi Selatan tercatat sekitar 67 aliran Sungai dengan jumlah aliran terbesar di Kabupaten Luwu, yakni 25 aliran sungai. Sungai terpanjang tercatat ada satu sungai yakni Sungai Saddang yang mengalir meliputi Kabupaten Tator, Enrekang dan Pinrang. Panjang sungai tersebut masing-masing 150 km.

Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 24 kabupaten. Takalar merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Takalar terletak antara 5°30'-5°38' Lintang Selatan dan 119°22'-119°39' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografis, Kabupaten Takalar memiliki batas-batas: di sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Jeneponto. Di sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Gowa. Sedangkan di sebelah barat dan selatan dibatasi oleh Selat Makassar dan Laut Flores.

Selain Kabupaten Takalar, Bantaeng juga merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis Kabupaten Bantaeng terletak ±120 km arah Selatan Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dengan posisi 5°21'13"-5°35'26" Lintang Selatan dan 119°51'42"-120°05'27" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bantaeng adalah 395,83 km<sup>2</sup>. Wilayah administrasi Kabupaten Bantaeng terbagi menjadi 8 wilayah kecamatan, Wilayah Kabupaten Bantaeng terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan yang pada bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Bulukumba, bagian selatan berbatasan dengan Laut Flores dan Bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto.

Kabupaten Bulukumba juga merupakan salah satu bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bulukumba terletak di bagian selatan Jajarah Sulawesi dan berjarak kurang lebih 153 km dari ibukota Provinsi Sulawesi Selatan terletak antara 05°20' – 05°40' lintang selatan dan 119°58'-120°28' Bujur Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Sinjai di sebelah utara, Sebelah Timur dengan Teluk Bone, sebelah Selatan dengan Laut Flores dan sebelah barat dengan Kabupaten Bantaeng. Luas wilayah Kabupaten Bulukumba sekitar 1.154,7 km<sup>2</sup> atau

sekitar 2,5 % dari luas wilayah Sulawesi Selatan yang meliputi 10 (sepuluh) kecamatan dan terbagi ke dalam kelurahan dan 109 desa.

### ***Inovasi Aplikasi E-budgeting dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan***

Inovasi *e-budgeting* yang digunakan untuk menyusun anggaran guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses anggaran memberikan peranan penting dalam pembuatan anggaran. Sistem tersebut mampu mempersingkat waktu yang diperlukan dalam proses pembuatan anggaran karena dilakukan secara online dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Sistem *e-budgeting* ini juga berfungsi sebagai alat pengawasan kerja yang dapat memantau proses dalam penyusunan anggaran. Selain itu, prosedur dalam *e-budgeting* dapat mengantisipasi potensi adanya *mark-up* dengan adanya sistem saling mengawasi, selain itu aplikasi sistem *e-budgeting* ini merupakan sistem penganggaran berbasis elektronik yang berfungsi mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, pemborosan anggaran dan tindak pidana korupsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa yang melatarbelakangi diterapkannya aplikasi *e-budgeting* adalah agar lebih memudahkan organisasi perangkat daerah (OPD) mengimput RKA kapanpun dan dimanapun karena aplikasi tersebut sudah bersifat online sehingga lebih praktis dan mampu mewujudkan transparansi anggaran serta penganggaran lebih efektif dan juga mampu mencegah pemborosan.

Penerapan *e-budgeting* bertujuan untuk mempermudah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD dalam proses penyusunan anggaran sehingga proses penyusunan menjadi singkat dan tepat waktu. Oleh karena itu saluran komunikasi yang digunakan pemerintah daerah guna memperkenalkan aplikasi *e-budgeting* sebagai inovasi pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan di 3 (tiga) Kabupaten yang menjadi objek penelitian ini adalah sosialisasi, bimbingan teknis (bimtek), pendampingan, *job in training* dan *coaching clinic*.

Informasi yang diperoleh pada saat proses pengenalan aplikasi *e-budgeting* ini adalah

tentang proses bisnis dari perencanaan dan pelaporannya, cara kerja dan pengimputan data, cara pengaplikasian, perencanaan, pengimputan dan penatausahaan administrasi keuangan, seperti pengisian RKA, SPP, DPA, selain itu juga di ajarkan tentang cara cetak RKA, DPA dan lain-lain yang berhubungan dengan anggaran.

Melalui *e-budgeting*, pemerintah dapat melakukan pengendalian anggaran dengan lebih baik karena proses penyusunan anggaran dapat dilakukan secara lebih transparan, tepat waktu, anggaran dapat dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dalam program kerja, kronologis anggaran dapat ditelusuri dengan jelas dan pembuatan laporan seputar realisasi anggaran dapat dibuat dengan lebih mudah.

### ***Keinovatifan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Inovasi Aplikasi E-budgeting dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan***

Tahapan pengenalan mengenai inovasi pengelolaan keuangan daerah terkait aplikasi *e-budgeting* kepada ASN di 3 (tiga) kabupaten yakni Kabupaten Takalar, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bulukumba dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, *job in training* dan *coaching clinic* berdasarkan tahapan penerima yang berada dalam proses pengambilan keputusan pada tahapan pengenalan maka dapat dikatakan bahwa ASN di Kabupaten Bantaeng merupakan ASN yang paling cepat menerima adanya informasi baru, sehingga ia dikategorikan sebagai *early adopter* (penerima dini), Kemudian ASN kedua dari Kabupaten Bantaeng juga merupakan orang yang cepat menerima informasi terkait inovasi pengelolaan keuangan daerah lewat saluran komunikasi formal yakni bimtek sehingga dapat dikategorikan sebagai penerima mayoritas cepat (*early majority*). ASN dari Bulukumba termasuk kategori *late majority* (penerima mayoritas lambat) sementara ASN dari Kabupaten Takalar termasuk dalam kategori *leggard* (pengikut/penerima paling lambat).

## **PEMBAHASAN**

### ***a. Inovasi Aplikasi E-budgeting dalam***

### ***Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan***

Penerapan sistem *e-budgeting* yang mempermudah tim anggaran pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah dalam proses penyusunan anggaran sehingga kualitas APBD dari sisi kesesuaian dengan RPJMD, keakuratan nilai dan rekening serta akuntabilitas alokasi belanja mengalami perkembangan yang signifikan. Gordon dalam Rochaety dkk, (2013) bahwa sistem informasi manajemen merupakan sistem manusia dan mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen dan proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi.

Proses penyusunan anggaran dengan menggunakan aplikasi *e-budgeting* menjadi sangat singkat dan tepat waktu, anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan dalam kegiatan masing-masing OPD, kronologis anggaran menjadi semakin jelas dan transparan serta dapat dengan mudah mengakses data secara online. Sehingga dapat dikatakan bahwa *e-budgeting* sebagai bagian dari konsep *e-government* yang dipandang sebagai mekanisme yang positif dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi dan pemberdayaan dari masyarakat. James A.F. Stoner dalam Rochaety dkk. (2013) bahwa sistem informasi manajemen merupakan metode yang formal yang menyediakan bagi pihak manajemen sebuah informasi yang tepat waktu, dapat dipercaya, untuk mendukung proses pengambilan keputusan bagi perencanaan pengawasan dan fungsi operasi sebuah organisasi yang lebih efektif.

Saluran komunikasi yang disebutkan di atas merupakan saluran komunikasi formal dimana saluran komunikasi formal sebagaimana yang dipaparkan oleh Gibson et al, (1997) yang mengemukakan bahwa dalam saluran komunikasi terdapat tiga jenis komunikasi formal dalam organisasi yaitu, komunikasi horizontal,

komunikasi diagonal, dan komunikasi vertikal. Hal ini sesuai dengan yang terjadi dalam proses sosialisasi, bimtek, pendampingan, job in training dan coaching clinic dimana pada saat proses tersebut terjadi proses komunikasi tiga arah tiga dimensi yaitu ke atas, ke bawah dan ke samping. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Fiske (2012) yang mengatakan bahwa saluran komunikasi selalu menyampaikan pesan yang dapat diterima melalui pancaindera atau menggunakan media. Pada dasarnya komunikasi yang sering dilakukan dapat berlangsung dua saluran, yaitu: (a) saluran formal atau yang bersifat resmi; (b) saluran informal atau yang bersifat tidak resmi. Saluran formal biasanya mengikuti garis wewenang dari suatu organisasi, yang timbul dari tingkat paling tinggi dalam organisasi itu sampai ke tingkatan paling bawah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa informasi mengenai sistem *e-budgeting* yang disampaikan melalui saluran komunikasi seperti yang disebutkan di atas dalam jangka waktu tertentu kepada Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Takalar, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bulukumba menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam hal ini perubahan pengetahuan dan keterampilan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Rogers dalam Hanafi (2011) yang menjelaskan tentang proses penyampaian inovasi yang dikomunikasikan melalui saluran-saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Lebih lanjut Littlejohn, W Stephen & Karen A. Foss (2014) yang mengemukakan bahwa difusi adalah proses yang dengannya inovasi menyebar dari waktu ke waktu kepada anggota sistem sosial. Suatu inovasi adalah pengenalan sesuatu yang baru, sebuah proyek, praktik atau ide. Proses keputusan inovasi adalah proses kemajuan yang dijalani individu dari

pertemuan pertama dengan inovasi ke adopsinya. Keinovasian adalah ukuran adopsi awal; individu dianggap inovatif dan menjadi agen perubahan potensial jika mereka mau mengadopsi ide-ide baru ketimbang anggota lain dari sistem dan mau melakukannya lebih awal ketimbang anggota lain. Terakhir, tingkat adopsi inovasi adalah kecepatan relatif pengadopsian inovasi.

b. ***Keinovatifan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Inovasi Aplikasi E-budgeting dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan***

Rogers dalam Hanafi (1987) yang membagi pelapisan penerima pesan atas lima tipe yaitu *innovator* (pembaharu), *early adopter* (penerima dini), *early majority* (penerima mayoritas cepat), *late majority* (penerima mayoritas lambat) dan *Leggard* (pengikut). Penerimaan informasi terkait dengan proses penyampaian informasi lewat saluran komunikasi *job in training* yang mana ASN di Kabupaten Bantaeng ini merupakan ASN yang paling cepat menerima adanya informasi baru mengenai inovasi pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini sistem *e-budgeting* sehingga ASN di Kabupaten Bantaeng dapat dikategorikan sebagai *early adopter* (penerima dini).

Kemudian ASN kedua dari Kabupaten Bantaeng juga merupakan orang yang cepat menerima informasi terkait inovasi pengelolaan keuangan daerah lewat saluran komunikasi formal yakni bimtek sehingga dapat dikategorikan sebagai penerima mayoritas cepat (*early majority*). ASN dari Kabupaten Bulukumba yang menerima informasi lewat saluran komunikasi bimtek tergolong dalam kategori *late majority* (penerima mayoritas lambat) sedangkan ASN dari Kabupaten Takalar yang menerima informasi mengenai inovasi pengelolaan keuangan daerah lewat saluran komunikasi sosialisasi yang dilanjutkan dengan kursus dalam jangka waktu satu bulan lamanya dapat dikategorikan sebagai *leggard* (pengikut/penerima paling lambat).

Cepat lambatnya penerimaan ASN terhadap inovasi *e-budgeting* di masing-masing kabupaten dikarenakan oleh saluran komunikasi yang digunakan berbeda-beda

sehingga jangka waktu yang digunakan pun berbeda-beda. Kecepatan adopsi terhadap suatu inovasi dipengaruhi oleh keuntungan relatif dari adanya inovasi tersebut. Ketika suatu inovasi lebih banyak memberikan keuntungan maka semakin cepat proses adopsi terhadap inovasi tersebut.

Rogers dalam Hanafi (1987) bahwa kecepatan adopsi bagi kebanyakan orang tergantung pada aspek-aspek keuntungan relatif. Keuntungan relatif adalah tingkatan dimana suatu ide baru dianggap sebagai sesuatu yang lebih baik daripada ide-ide yang ada sebelumnya. Keuntungan relatif dari adanya aplikasi sistem *e-budgeting* di Kabupaten Takalar dan Kabupaten Bulukumba adalah pekerjaan ASN lebih praktis karena sudah online sehingga aplikasi ini secara tidak langsung dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan pencatatan, penyusunan anggaran sudah bisa lebih cepat, kapanpun dan dimanapun ASN sudah bisa mengimput data, proses pengimputan pun sudah jauh lebih mudah akan tetapi perencanaan dan penggaran belum terintegrasi.

Berbeda halnya di Kabupaten Bantaeng yang menggunakan aplikasi baru terkait dengan sistem *e-budgeting* dimana semua pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan lebih terarah dan satu pintu yang berarti bahwa semua data dapat diakses oleh semua orang dan perencanaan, penganggaran sampai pengawasan itu sudah terintegrasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan adalah: (1) Aplikasi *e-budgeting* dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan sebuah inovasi karena semua pengelolaan keuangan daerah sebelum adanya *e-budgeting* masih bersifat offline dan dilakukan secara manual, namun setelah adanya *e-budgeting* sebagai inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah proses pengelolaa keuangan daerah menjadi sangat mudah karena sudah bersifat online sehingga dapat dikatakan bahwa inovasi aplikasi *e-budgeting* yang disampaikan kepada para ASN

di masing-masing kabupaten melalui saluran komunikasi tertentu menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam hal ini perubahan pengetahuan dan keterampilan (2) Keinovatifan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap inovasi aplikasi *e-budgeting* dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan juga berbeda-beda karena saluran komunikasi yang digunakan berbeda-beda sehingga jangka waktu yang digunakan pun berbeda-beda dengan demikian kecepatan adopsi terhadap suatu inovasi dipengaruhi oleh keuntungan relatif, ketika suatu inovasi lebih banyak memberikan keuntungan maka semakin cepat proses adopsi terhadap inovasi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ahmad, A.S. 1999. *Manusia dan Informasi*. Hasanuddin University Press, Makassar.
- Amsyah, Z. 2003. *Manajemen Sistem Informasi*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bungin, B. 2013. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Kencana, Jakarta.
- Cangara, Hafied 2014. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Perencanaan & Strategi Komunikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Davis, B.G. 1999. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen. Bagian II Struktur dan Pengembangannya*. PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.

- Effendy Uchjana, Onong. 2003. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fiske, John. 2012. *Pengantar Ilmu Komunikasi, Edisi ketiga*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Hanafi, Abdillah. 1987. *Memasyarakatkan ide-ide baru*. Usaha Nasional, Surabaya.
- Isa, I. 2012. *Evaluasi Pengontrolan Sistem Informasi*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- James, L. Gibson, dkk. 1997. *Organisasi : Perilaku, Struktur, Proses*, Jilid 2. Binarupa Aksara, Jakarta.
- Jogiyanto. 2007. *Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi*. C.V Andi Offset, Yogyakarta.
- Kadir, Abdul dan Triwahyuni Ch. Terra. 2014. *Pengantar Teknologi Informasi Edisi Revisi*. C.V Andi Offset, Yogyakarta.
- Kriyantono, R. 2014. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Kencana, Jakarta.
- Kumorotomo, W. dan Margono, SA. 2009. *Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi-organisasi Publik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Littlejohn & Foss A. K. 2011. *Teori Komunikasi, Theories of Human Communication, Edisi 9*. Salemba Humanika, Jakarta.
- Mondry. 2008. *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mustafa, Delly. 2013. *Birokrasi Pemerintahan*. Alfabeta, Bandung.
- McQuail & Denis, 2011. *Teori Komunikasi Massa Mcquail*, Edisi 6 Buku1. Salemba Humatika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011. *Teori Komunikasi Massa Mcquail*, Edisi 6 Buku2. Salemba Humatika, Jakarta.
- Nugroho, Eko. 2007. *Sistem Informasi Manajemen, Konsep, Aplikasi dan Perkembangannya*. Andi Publisher, Yogyakarta.
- Nurhadi, Zikri Fachrul. *Teori Komunikasi Kontemporer*. Kencana, Jakarta.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2002. *Metode Penelitian Komunikasi*. PT Rosdakarya, Bandung.
- Rochaety, E. dkk. 2013. *Sistem Informasi Manajemen*. Edisi 2. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Ruslan, Rosady. 2010. *Metode Penelitian Public Relations dan komunikasi*. Jakarta: Grafindo Persada
- Sanapiah, Faisal. 2010. *Format-format Penelitian Sosial*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Scott, G.M. 2002. *Principles Of Management Information System (Prinsip-Prinsip Sistem Informasi Manajemen diterjemahkan oleh Achmad Nashir Budiman)*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sunyoto, D. 2014. *Sistem Informasi Manajemen: Prespektif Organisasi*. PT. Buku Seru, Jakarta.

## B. KARYA ILMIAH

- Darwin. 2017. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam Menciptakan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Sinjai. Universitas Hasanuddin
- M. Soleh Pulungan, *Optimalisasi SIMDA dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang Lebih Berkualitas*.(diakses pada tanggal 22 Januari 2018)
- Mubarak, N. 2015. *Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIMDA Keuangan) Dalam Mendukung Kecepatan Laporan dan Pengawasan Keuangan Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wajo*, Tesis tidak diterbitkan, Makassar:

Program Pascasarjana Universitas  
Hasanuddin.

Sofia, Rahayu. 2016. *Inovasi Pelaporan  
Pengelolaan Dana Desa (Proses  
Komunikasi Dalam Adopsi Inovasi  
Sistem Keuangan Desa di Desa  
Tawang Sari Kecamatan Teras  
Kabupaten Boyolali)*. Tesis Magister  
(S.2.) Program Pascasarjana,  
Universitas Sebelas Maret

### C. INTERNET

Humas [BPKP](http://www.bpkp.go.id) Sulsel.  
<http://www.bpkp.go.id/berita/read/18533/890/-Workshop-SIMDA-Perencanaan-dalam-rangka-Pemberantasan-Korupsi-Terintegrasi-di-Sulsel-bpkp> diakses tanggal 23  
februari 2018, pukul 00.24

<http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/Versi-2.1.bpkp> diakses pada hari Selasa  
Tanggal 3 Februari 2018 Pukul 08.12  
WITA.

<http://rajutmasadepan.blogspot.co.id/2017/10/simda-keuangan-rilis-12-27012.html>  
diakses hari Selasa pada tanggal 6  
Februari 2018 pukul 21.51 WITA.

<https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2015/02/3-jenis-komunikasi-formal-dalam.html>  
diakses pada tanggal 2 Februari  
pukul09.00 wita